

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Komunikasi Dalam Konteks Pemerintah

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal. Pesan yang disampaikan dan yang diterima bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (sharing ideas), instruksi (instruction), atau perasaan-perasaan (feelings) (Malone, 1997: 170) berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya.

Pada dasarnya, komunikasi adalah suatu bidang atau fungsi tertentu yang dibutuhkan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi non komersial. Komunikasi merupakan mediator yang ada diantara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam usaha untuk membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Sebagai publik, mereka berhak mengetahui rencana kebijaksanaan, aktivitas, program kerja dan rencana-rencana usaha suatu organisasi berdasarkan keadaan, harapan-harapan, dan sesuai dengan kebutuhan publik sasaran.

B. Pengertian Strategi Komunikasi

Perlu diketahui bahwa dalam sebuah proses komunikasi arah sasaran komunikasi adalah berorientasi pada efektivitas. Untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif diperlukan adanya strategi operasional tertentu. Oleh karena itu penulis akan memaparkan terlebih dahulu hal yang mendasari penelitian ini agar bisa mendapatkan gambaran mengenai pengertian strategi dalam hubungannya dengan komunikasi. Seperti yang dikemukakan oleh Arifin (1994:10) bahwa strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional tentang

tindakan yang akan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, jadi merumuskan suatu strategi komunikasi berarti memperhitungkan situasi dan kondisi (waktu dan ruang) yang dihadapi maupun yang akan dihadapi di masa mendatang untuk mencapai efektivitas. Selain itu pakar komunikasi yang lainnya yaitu Effendy (2007 :32). Juga mengemukakan bahwa strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi agar mencapai tujuan tersebut strategi harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi komunikasi merupakan paduan 20 dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan strategi komunikasi hendaknya kita harus mengetahui tujuan sentral strategi komunikasi itu. R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, *Techniques For Effective Communication*, menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu: *To secure understanding* (Memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya), *To establish acceptance* (Andai kata komunikan sudah mengerti dan menerima maka ia perlu dibina), dan *To motivate action* (pada akhirnya kegiatan itu dimotivasi). Penelaahan mengenai berlangsungnya sebuah komunikasi tidak bisa lepas dari pengkajian terhadap pertautan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dalam proses komunikasi. Arifin Anwar (1984:87) menyatakan bahwa elemen yang harus diperhatikan didalam merumuskan strategi komunikasi adalah pengenalan khalayak, pesan, metode, media, dan komunikator. Dengan begitu untuk mantapnya perumusan strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan Harold Laswell "*Who Says What Which What Channel To Whom With What Effect?*", maksudnya yaitu: *Who?* (Siapakah komunikatornya), *what?* (pesan apa yang dinyatakannya), *In which channel?* (media apa yang digunakannya), *To Whom?* (siapa komunikannya), dan *With what effect?* (efek apa yang diharapkan).

Komunikasi merupakan proses yang rumit. Maka dari itu saat menyusun strategi komunikasi selain memperhatikan keterkaitan komponen-komponenya juga perlu mempertimbangkan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

a. **Pengenalan Khalayak** Sebelum kita melancarkan komunikasi kita harus tahu siapa saja yang akan menjadi sasaran komunikasi kita itu. Sehingga dalam strategi komunikasi, melakukan identifikasi khalayak sasaran adalah hal penting yang perlu dilakukan oleh seorang komunikator. Harus diketahui bahwa khalayak tidak hanya berperan pasif namun juga menjadi bagian aktif. sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja terjadi hubungan tapi juga dapat saling mempengaruhi. Sifat khalayak yang aktif ini mengharuskan seorang komunikator memahami khalayak terlebih dahulu. Apapun tujuannya, metodenya, dan banyaknya sasaran, pada diri komunikan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- **Kerangka referensi** Kerangka referensi seseorang dalam dirinya dibentuk melalui hasil dari paduan pengalaman, tingkat pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dll. Jadi setiap orang akan memiliki kerangka referensi yang berbeda-beda sesuai dengan taraf hidup mereka. Dengan demikian pesan yang disampaikan kepada komunikan harus disesuaikan dengan kerangka referensi khalayaknya.
- **Situasi dan kondisi** Yang dimaksudkan situasi disini adalah situasi komunikasi ketika khalayak sasaran (komunikan) akan menerima pesan yang kita sampaikan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kondisi disini adalah state of personality komunikan, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikan padasaat ia menerima pesan. Komunikasi tida akan efektif jika komunikan dalam keadaan bingung, marah, sedih, sakit, atau lapar.

b. **Penyusunan Pesan** Setelah khalayak dan situasinya telah diketahui dengan jelas maka langkah selanjutnya yaitu menyusun pesan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pesan adalah menentukan tema dan materi. Syarat utama untuk penyusunan pesan adalah pesan yang akan disampaikan mampu membangkitkan perhatian. Hal ini sesuai dengan konsep komunikasi yang dinamakan AIDDA, singkatan dari *Attention* (perhatian) *Interest* (minat), *Desire* (Hasrat), *Decision* (Keputusan), dan *Action* (kegiatan). AIDDA itu sering juga disebut *A-A Prosedure (From Attention To Action*

Procedure), yang artinya membangkitkan perhatian untuk menggerakkan seseorang melakukan suatu kegiatan sesuai tujuan yang dirumuskan.

c. Menetapkan Metode Setelah mengenali khalayak dan melakukan penyusunan pesan dengan sedemikian rupa maka tahap selanjutnya adalah menentukan metode, saat menentukan sebuah metode harus disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas dan biaya. Anwar Arifin mengemukakan metode komunikasi yang efektif, sebagai berikut:

1) Redudency adalah proses mempengaruhi khalayak dengan cara mengulang-ngulang pesan yang disampaikan untuk menarik fokus khalayak.

2) Canalizing Metode ini adalah metode pemahaman terhadap khalayak. Oleh karena itu pada hakekatnya kelompok/khalayak terbentuk dari sebuah keakraban yang kuat dan tujuan yang tentunya sama, maka akan sulit menanamkan pengaruh, untuk itu situasi kelompok terpecah akan memungkinkan sebuah pesan diterima dengan baik.

3) Informatif yaitu suatu bentuk isi pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara memberikan penerangan. Penerangan disini maksudnya adalah penyampaian pesan apa adanya atau suatu keadaan yang sesungguhnya dengan fakta-fakta dan data-data serta pendapat-pendapat yang benar. Sehingga dengan demikian pesan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

4) Persuasive berarti mempengaruhi khalayak dengan membujuk. Dalam hal ini komunikator harus mampu menggugah pikiran dan perasaan khalayak. Metode ini tidak memberikan kesempatan pada khalayak untuk menjadi kritis atau bisa dikatakan sebagai metode sugesti.

5) Edukatif merupakan metode yang sangat umum, metode ini memberikan wawasan terkait fakta-fakta, pengalaman dan sebagainya kepada khalayak yang intinya mendidik.

6) Cursive Metode ini adalah cara mempengaruhi khalayak dengan memaksa. Dalam hal ini khalayak dipaksa untuk menerima gagasan-gagasan yang disampaikan. Oleh karena itu dalam penyampaian gagasan juga berisi ancaman-ancaman.

d. Pemilihan media komunikasi Media komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah proses penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Media banyak jenisnya yakni ada yang media cetak maupun elektronik. Namun efektivitas dari masing-masing media itu sendiri juga berbeda. Di dalam ilmu komunikasi dikenal dengan komunikasi langsung dan media massa. Jika sasarannya hanya terdiri dari beberapa orang saja dan lokasinya dapat terjangkau maka digunakan komunikasi langsung atau tatap muka, termasuk jika sasarannya internal public bisa menggunakan pertemuan-pertemuan, sedangkan jika sasarannya orang banyak dan tersebar di mana-mana maka bisa memanfaatkan media massa.

e. Peranan Komunikator dalam komunikasi Dalam penyampaian pesan diperlukan komunikator. Adanya komunikator merupakan unsur penting dan dominan bagi keseluruhan proses komunikasi yang efektif. Komunikator dianggap berhasil jika mampu mengubah opini, sikap dan perilaku komunikannya. Menurut Onong Uchjana Efendy (2007:38) ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan komunikator untuk meluncurkan komunikasinya, yaitu:

- Daya tarik sumber Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi akan mampu mengubah opini, sikap dan perilaku seorang komunikan ketika ia mampu menarik perhatian dengan membuat pihak komunikan merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikan bersedia taat terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator.
- Kredibilitas sumber Faktor kedua yang menyebabkan komunikasi berhasil adalah adanya kepercayaan komunikan terhadap komunikatornya. Kepercayaan itu tergantung pada bagaimana kemampuan dan ketrampilan seorang komunikator dalam menyampaikan pesan ataupun bagaimana kepribadiannya serta keakraban yang terjalin antara komunikan dengan komunikator. Berdasarkan kedua faktor di atas, seorang komunikator dalam menghadapi komunikannya diharuskan mampu bersikap empatik, yaitu kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Dengan perkataan lain komunikator mampu merasakan apa yang dirasakan komunikan saat berkomunikasi dengannya.

Strategi adalah bagian dari suatu rencana (*plan*), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu fungsi perencanaan (*planning*) yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen (Atika & Irawan, 2021).

C. Peran

Soerjono Soekanto (2002:221) mengemukakan bahwa teori peran (*role theory*) adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi, apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dan lingkungannya. Peran merupakan dinamisasi dan statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian. Peran pemerintah daerah antara lain :

a. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan penerbitan peraturan-peraturan, sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Pemerintah sebagai dinamisor

Pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi jika terjadi kendala-kendala dalam prosen pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, pemerintah berperan dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan yang berwujudkan melalui tim Penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, sebagai fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau di bidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

Peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat di katakan berhasil apabila masyarakat daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, politik.

D. Survei

Secara etimologi kata survei berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata yakni sur yang berasal dari kata super yang berarti di atas atau melampui. Sedangkan suku kata vey berasal dari kata videre yang berarti melihat. Jadi survey berarti melihat di atas atau melampui. Dari kutipan diatas, survei merupakan kegiatan observasi pada lapangan untuk menganalisis suatu objek penelitian yang akan dibuat. survei merupakan suatu bentuk aktifitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, dan banyak diantaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai

suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya. Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivist pada ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif”. Penelitian survey menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi (Susila, 2019).

Ada tiga macam langkah dasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu:

- 1) Meninjau faktot-fakor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Adanya perubahan yanag ada akan menjadi satu hambatan dalam pencapaian tujuan, begtitu pula dengan faktor internal yang diantaranya strategi tidak efektif atau hasil implememnatsi yang buruk dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang akan dicapai.
- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan). Prosesnya dapat dilakukan dengan menyelidiki penyimpanan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Kriteria untuk mengevalausi strategi harus mudah diukur dan mudah dibuktikan, kriteria yang meramalkan hasil lebih penting dari pada kriteria yang mengungkapkan apa yang terjadi.
- 3) Mengembalikan tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana. Dalam hal ini tidak harus berarti yang ada ditinggalkan atau merumuskan strategi baru. Tindakan korekratif diperlukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan hasil yang dibayangkan semula atau pencapaian yang diharapkan

E. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapat, kesehatan, dan produktivitas. Sekalipun masyarakat banyak yang masih memiliki pendidikan rendah itu di sebabkan oleh faktor ekonomi karena pendidikan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dalam kaitan itu, Koswara dan Sugiri menyatakan bahwa hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan pendidikan. Yang dihimpun melalui yaitu :

- a. Melakukan upaya peningkatan keterampilan masyarakat melalui program yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan formal yang memadai.
- b. Melakukan upaya peningkatan keterampilan masyarakat melalui program yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan non formal yang memadai.
- c. Menstimulasi/ mendorong serta memberikan motivasi kepada masyarakat agar mereka mau meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui dialog dan kampanye pendidikan (Sugiri,2012).

F. Pemberdayaan Ekonomi

Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian), faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut Supriatna dalam Sugiri hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu :

- a. Membantu masyarakat menyediakan program pemberdayaan dibidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi).
- c. Serta membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses bantuan permodalan.

G. Pemberdayaan sosial budaya

Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada perbedaan peran serta tanggung jawab di antara masyarakat yang lain setiap manusia harusnya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam lingkungan. Hal yang perlu diperankan oleh Pemerintah Yaitu:

- a. Membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olah raga, dan lain lain dalam hal merupaka sarana yang di butuhkan masyarakat).

- b. Memberikan bantuan dana sosial juga mendorong partisipasi warga dalam berbudaya.
- c. Dan melakukan pembinaan dalam kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat

H. Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan merupakan bagian dari perubahan cara berfikir manusia, pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan tetapi membuat mereka sadar dengan diri mereka sendiri dan apa yang diinginkan nya dalam hidup. Interaksi antara manusia didasari oleh pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menantang atau kalah, pemberdayaan di dasarkan atas kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan, dalam kaitan ini ada dua hal pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologi masyarakat yaitu :

Pemerintah daerah berupaya mengubah cara pikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara pikir yang lebih modern (sesuai dengan perkembangan jaman) yang berarti peran pemerintah adalah sebagai “agen pembaharu”

- a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan nilai demokrasi, terutama dalam mengambil keputusan bersama dalam bermusyawarah-mufakat, kegotongroyongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

I. Pemberdayaan Politik

Dalam pemberdayaan politik adalah bagaimana setiap orang memiliki peluang dan partisipasi yang sama dengan kegiatan politik yaitu pengambilan keputusan kepemimpinan, keterlibatan dalam lembaga politik, kesempatan dalam memberikan pendapat, kesempatan dalam hak pengambilan suara. Menurut Adi dalam Sugiri hal yang berkaitan dalam pemberdayaan politik yang perlu di perankan oleh pemerintah yaitu :

- a. Pemerintah Daerah memberikan akses /peluang yang sama kepada masyarakat dalam kegiatan politik.

- b. Pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Dari ke lima komponen diatas pemberdayaan msyarakat, pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci, sebagai pemberdayaan yang lainnya karena ketika masyarakat berpendidikan otomatis masyarakat dapat menerima serta dapat menjalankan apa saja program pemerintah dalam membangun masyarakat untuk menjadikan wilayah lebih memiliki potensi yang lebih baik dari sebelumnya, serta di dukung penuh dengan pemberdayaan yang lain guna mensejahterakan masyarakat.

J. Fungsi Komunikasi

Fungsi humas memiliki arti penting. Setiap lembaga pemerintah harus menyadari bahwa fungsi humas pemerintah sangat penting karena dapat berdampak positif bagi kinerja lembaga maupun kehidupan masyarakat. Fungsi pokok humas pemerintah diantaranya adalah:

- a. Turut serta menjaga kebijakan Pemerintah
- b. Menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dan melakukan pelayanan pada publik
- c. Menjembatani kepentingan lembaga dan publiknya melalui menampung aspirasi dan memperhatikan keinginan publik;
- d. Membentuk iklim positif di sekitar lembaga dan publiknya untuk stabilitas politik juga keamanan nasional.

Sesungguhnya kesadaran akan arti penting humas untuk lembaga pemerintah sudah sejak lama dimiliki pemimpin pemerintahan di Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya departemen penerangan sebagai salah satu departemen yang fungsinya antara lain sebagai humas pemerintah. Departemen penerangan melaksanakan aturan fungsi komunikasi dengan mengkomunikasikan sebuah produk ataupun sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Prastowo, 2020).

K. Teori Komunikasi Humas

Menurut James E. Grunig, perkembangan *humas* dalam konsep dan praktik dalam proses komunikasi yaitu terdapat 4 model yaitu;

- a. *Model-Publicity or Press Agency Model* (Agen Pemberitaan), Model komunikasi ini merupakan komunikasi satu arah dimana seorang komunikator secara langsung dapat menyampaikan informasi kepada komunikan. Pada bentuk komunikasi ini, komunikator tidak terlalu mengkhawatirkan *feedback* yang datang. Biasanya memanfaatkan publik figur, *opion Leader*, kay persons yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Model ini bertujuan untuk melakukan publisitas yang menguntungkan, tanpa ingin mengetahui tanggapan audiensi atau komunikan. Karakteristik dari model komunikasi ini adalah dengan menggunakan teknik persuasi dan manipulasi untuk mempengaruhi audiensi agar dapat berperilaku sesuai dengan keinginan organisasi. Model komunikasi ini biasanya menggunakan taktik propaganda dengan penggunaan nama *public relation expert* dan perangkat yang bisa memancing perhatian khalayak melalui argumen dan penalaran sehingga khalayak lebih tertarik dengan informasi-informasi yang diberikan. Hal ini menggambarkan seolah-olah program-program humas memiliki tujuan tunggal agar terpublikasi melalui media massa yang menguntungkan (*favourable*) bagi organisasi. Model komunikasi ini terkadang tidak mengutamakan kebenaran informasi yang disampaikan sehingga kebenaran informasi bukan menjadi pokok utama.
- b. *Model-Public* (Model Informasi Publik), Komunikasi informasi publik berbeda dengan model komunikasi agen pemberitaan karena tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan dan menginformasikan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik dan bukan untuk kegiatan promosi dan publisitas, tetapi tujuannya menginformasikan program dan kebijakan organisasi apa adanya (jujur). Namun, alur komunikasi dari komunikator ke komunikan masih tetap satu arah. Sekarang model ini sering digunakan oleh humas di pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan bahkan beberapa korporasi. Model komunikasi ini mempunyai karakteristik menggunakan rilis dan teknik komunikasi satu arah. Umumnya kegiatan komunikasi ini menggunakan koran, brosur, dan majalah yang berisi informasi mengenai perusahaan. Dalam mendistribusikan informasi, perusahaan melakukannya secara berkala. Bentuk ini akan lebih baik karena mengandung lebih banyak kebenaran.

- c. *Model-Two Way Asymmetrical* (Model Simetris Dua Arah), Model komunikasi simetris dua arah dapat menjadi sebuah pedoman bagi humas dimana organisasi dan publik saling menyesuaikan diri. Fokus pada penggunaan metode riset ilmu sosial dalam penelitian dan teknik komunikasi untuk mengelola konflik dan memperbaiki pemahaman publik secara strategis oleh Grunig. Model komunikasi ini memiliki karakteristik menggunakan teknik negosiasi dan model ini juga dapat meningkatkan pemahaman bersama dan rasa saling menghormati antara pemerintah dan masyarakat. Model ini merupakan model yang paling tepat dan dianggap lebih etis dalam menyampaikan pesan atau informasi. Dalam komunikasi ini komunikan dapat membujuk serta dapat juga membangun rasa saling pengertian, pemahaman, dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Model ini biasanya digunakan pada perusahaan/organisasi di bawah kontrol pemerintah.
- d. *Model-Two Way Asymmetrical Model* (model asimetris dua arah), Model komunikasi ini menggunakan komunikasi dua arah, akan tetapi kadangkadang terjadi komunikasi tidak seimbang (*Zero Sum game*), *feedback* komunikan tidak diperhitungkan. Model ini menerapkan metode riset ilmu sosial untuk meningkatkan efektivitas pengaruh pesan yang disampaikan. Praktisi humas menggunakan model ini dalam bentuk strategi ilmiah, survei, dan wawancara untuk mengukur serta menilai publik sehingga mereka bisa merancang program humas yang bisa memperoleh dukungan dari publik. Terdapat timbal balik (*feedback*) untuk proses pembuatan program. Model komunikasi ini masih menekankan cara organisasi membuat publik menyesuaikan diri dengan keinginan organisasi bukan sebaliknya (organisasi yang menyesuaikan kepentingan publik). (Nababan, 2020)

L. Jenis dan Pendekatan Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Untuk dapat bersosialisasi dengan sekitar, komunikasi mutlak diperlukan. Tentunya, tidak hanya sekedar berbicara atau berkirim pesan, namun harus mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain untuk menghindari kesalahpahaman. Terkadang, kesalahpahaman dalam berkomunikasi dapat mengakibatkan masalah yang jauh lebih besar. Hal ini karena setiap individu

memiliki karakternya masing-masing yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Untuk itu, penting untuk mengetahui beberapa jenis pendekatan dalam berkomunikasi. Terdapat setidaknya 4 jenis pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan aktor atau subjek

Pendekatan yang pertama adalah pendekatan aktor atau subjek. Jenis pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan pihak pertama karena didasarkan pada persepsi si pembicara. Dalam pendekatan aktor, seseorang melakukan komunikasi dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat bagi dirinya sendiri. Dengan melakukan pendekatan ini, maksud dan tujuan si pembicara akan tersampaikan serta mendapatkan respon yang diharapkan.

2. Pendekatan objek

Jenis pendekatan dalam komunikasi yang kedua adalah pendekatan objek. Dalam hal ini, yang diperhatikan oleh pihak penutur adalah persepsi atau sudut pandang lawan bicara. Penutur mempertimbangkan perasaan serta pemikiran lawan bicara sehingga komunikasi yang dilakukan dapat dimengerti dengan baik serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam hal ini, pihak penutur perlu untuk mengetahui siapa lawan bicaranya, apakah dia tua atau muda, latar belakang keluarga, daerah, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, pendekatan objek sering diabaikan sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik atau bahkan menyebabkan salah satu pembicara tersinggung.

3. Pendekatan emosional

Pendekatan emosional dalam komunikasi adalah kemampuan untuk memposisikan diri di pihak lawan bicara. Tujuannya hampir sama dengan pendekatan objek yang disebutkan di atas, yaitu melihat dari sudut pandang lawan bicara apakah cara komunikasi kita dapat diterima. Namun, dalam hal ini situasi emosi yang lebih ditekankan. Sebagai penutur, seseorang harus mampu berpikir apakah kata-kata yang diucapkan dapat diterima

dengan baik oleh lawan bicara. Selain itu, harus dipastikan pula apakah kata-kata tersebut tidak menyinggung perasaan. Tentunya, penutur harus mempelajari latar belakang lawan bicara dan sebagainya agar hal tersebut dapat dihindari.

4. Pendekatan eksplisit

Manusia memiliki keterbatasannya dalam hal pengetahuan serta untuk memahami manusia lainnya termasuk lawan bicara Anda. Maka, pengetahuan eksplisit diperlukan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang orang lain. Pengetahuan eksplisit bisa didapatkan dari berbagai sumber misalnya dengan membaca buku, membaca artikel lewat internet, menonton berita, dan lain sebagainya. Referensi yang diperoleh dari sumber-sumber di atas dapat digunakan untuk memahami orang lain serta melakukan komunikasi dengan mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Dengan demikian, tujuan berkomunikasi dapat dicapai sepenuhnya tanpa masalah.

M. Pelaksanaan Strategi Komunikasi

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. dalam (Tjiptono, 2008: 3), strategi memiliki konsep yang dapat didefinisikan, ada pun 2 perspektif yang berbeda, yaitu: 1. perspektif apa yang ingin dilakukan oleh organisasi (intends to do), strategi dapat diartikan sebagai program untuk menentukan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi dan menjalankan misinya. Artinya pihak manager memiliki peranan khusus dalam memainkan perjalanan sebuah organisasi, sikap yang aktif, sadar dan rasional dalam menentukan strategi organisasi 2. pada akhirnya organisasi memiliki perspektif yang akan dilakukannya (eventually does), strategi diartikan sebagai cara menanggapi dan merespon organisasi pada lingkungannya sepanjang waktu. Hanya manager yang reaktif yang memiliki pandangan seperti ini, yaitu hanya memiliki tanggapan dan menyesuaikan terhadap lingkungan secara pasif ketika dibutuhkan.

N. Definisi Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif (Maffirotin et al., 2018). Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Jaminan ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Utamanya merupakan sebuah bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial yang di dalamnya termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak.

Hubungan bantuan sosial dengan jaminan sosial sangat berkaitan karena sangat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Salah satu penyebabnya peningkatan penduduk yang menyandang kecacatan yang diakibatkan dari ekonomi yang tidak memadai sehingga membuat para penyandang cacat berat menjadi bingung bagaimana bertahan hidup (Firdausu, 2021).

Dari Asma' binti Abi Bakr, Rasulullah : *Infakkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mersedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.*" (HR al-Bukhari no. 1433 dan Muslim no. 1029)

O. Jenis Bantuan Sosial

Pemerintah kian sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi terdampak musibah dan pada dua tahun belakangan ini dunia sedang mengalami krisis sangat parah akibat virus corona (Covid-19). Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19. Ada beberapa jenis bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Program Non-Reguler
 - 1) Bantuan langsung tunai dana desa
 - 2) Bansos sembako untuk Tebing Tinggi Kota
 - 3) Bantuan sosial tunai
 - 4) Pembebasan biaya listrik
- b. Program Reguler (3 program).
 - 1) Kartu Prakerja.
 - 2) Penambahan peserta Program Keluarga Berencana.
 - 3) Kartu Sembako.

Syarat dari penerimaan sejumlah bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Kelurahan.
- b. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
- d. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
- e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

- f. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial. Terutama warga yang menengah kebawah. Kemiskinan yang kian meningkat merupakan keadaan saat ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, Pemahaman utamanya mencakup:
- 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
 - 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan (Mahendra & Purnawijaya, 2019). Dengan demikian, program bantuan sosial ini diperuntukkan misalnya untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Persoalan pada penyaluran yang salah sasaran membuat kebijakan bantuan sosial menjadi kurang efektif.

P. Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata salur yang berarti mengalirkan, mengarahkan, meneruskan atau mendistribusikan. Penyaluran sendiri dapat dipahami sebagai proses, cara, ataupun perbuatan menyalurkan. Penyaluran meliputi aspek pelaksanaan dan penatausahaan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 . Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur untuk memperoleh dana bantuan sosial, Untuk dapat memperoleh dana bantuan sosial yang harus dilakukan oleh para pemohon, yaitu:

- a. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah,
- b. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis tersebut. Jika disetujui oleh kepala SKPD terkait maka akan diberikan rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- c. TAPD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- d. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD akan menjadi dasar percantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- e. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Q. Pendekatan Komunikasi Dengan Al- Quran

Di dalam khazanah Islam kata “Komunikasi” memang selalu digunakan, baik dalam bahasa tulisan maupun lisan. Namun, ada dua kata yang memiliki makna yang sama, yaitu “*habl*” yang artinya “tali atau hubungan” atau “*silaturahmi*” yang artinya “menyambung persaudaraan”.

Keduanya sering digunakan dalam bahasa khazanah keIslaman. Penggunaan kata “*habl*” sebagaimana firman Allah di dalam surah Al Imran ayat 112 :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفْقَهُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya:

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.”

Maksud dari teknik kemasyarakatan ialah bahwa Komunikasi merupakan senjata untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dan dalam masyarakat melalui pendekatan sosiologis dan ajakan yang komunikatif, sehingga timbul:

- saling mengerti (*mutual understanding*),
- saling kesepakatan (*mutual agreement*),
- saling memberi manfaat bersama (*mutual benefits*).

Melaksanakan implementasi manajemen Komunikasi diperlukan oleh anggota organisasi pendidikan dengan masyarakat untuk bisa saling.

R. Bantuan Sosial Dalam Perfektif Al- Quran

Dalam Al-Qur'an pun, dijelaskan mengenai public relations sebagaimana bunyi ayat dalam surah, Al-Maidah ayat 67 :18

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَالَّذِينَ يَعْصُونَ مِّنَ النَّاسِ إِنَّا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya :

“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia”.

Pada ayat tersebut di atas dijelaskan bagaimana Rasul diperintahkan untuk menyampaikan amanah dari Allah SWT, yang telah mengutusnyanya. Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan Ilmu Komunikasi maupun dalam aktivitas public

relations, maka diperoleh pemaknaan mengenai perintah penyebaran informasi, dan dalam ilmu public relations dapat ditarik pula kesimpulan mengenai perintah pelaksanaan tugas public relations yang diberikan oleh perusahaan untuk dilaksanakan. Apabila disatukan kedua pemaknaan tersebut maka kesimpulannya adalah melaksanakan penyebaran informasi yang dipercayakan oleh perusahaan untuk dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan berarti terdapat pelanggaran atas tugas yang dipercayakan untuk dilakukan.

Bantuan sosial adalah bantuan yang berupa uang, barang, maupun jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan rentan terhadap segala resiko sosial. Tentu, bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh penerimanya. Sehingga perekonomian tersendat dan tidak berjalan dengan baik, yang paling merasakan dampaknya adalah tentu semua masyarakat yang rentan dengan resiko sosial.

Oleh karenanya, sungguh dzalim siapapun yang mengambil bantuan sosial tanpa hak atau melakukan korupsi terhadap dana bantuan tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Mengenai ayat tersebut, Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di mengatakan dalam tafsirnya *As-Sa’di* bahwa Allah SWT menjelaskan tentang hukum memakan harta orang lain secara *bathil*, dan itu hukumnya adalah haram. Artinya bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk memakan harta saudaranya tanpa kerelaan darinya.

Kemudian makna lainnya adalah ada hal yang lebih parah dibanding memakan harta orang lain secara *bathil*, yakni melakukan suap kepada hakim dan jaksa agar memberikan putusan yang menguntungkannya dan merugikan lawannya. Mereka

melibatkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara bahkan memakan harta saudaranya dengan jalan persaksian dan sumpah palsu.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) mengenai Qs. Al Imran 159 :

Maka disebabkan oleh rahmat yang besar dari Allah-lah akhlak kamu -wahai Nabi- menjadi lunak kepada sahabat-sahabatmu. Seandainya engkau menunjukkan sikap kasar dalam ucapan dan tindakanmu, serta mempunyai hati yang keras, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu. Oleh karena itu maafkanlah kekurangan mereka dalam bersikap kepadamu. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan Allah. Bermusyawarahlah dengan mereka untuk membahas masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian apabila kamu sudah bertekad melakukan sebuah keputusan setelah bermusyawarah, maka kerjakanlah dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya, dan Dia memberikan bimbingan serta dukungan-Nya kepada mereka.

S. Kajian Terdahulu

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian terkait strategi baik yang dilakukan oleh instansi Republik di Indonesia. Beberapa penelitian tentang permasalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial baik di era pandemi maupun sebelum pandemi dan sesudah pandemi seperti sekarang ini.

- a. Penelitian dilakukan oleh (Mar'atus Sholihah 2016) yang berjudul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kec Kabat Kab. Banyuwangi” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan atas dasar tujuan untuk menjelaskan bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Banyuwangi yaitu menjalankan salah satu program dari pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan yakni dengan mengimplementasikan Program Keluarga Harapan.
- b. Penelitian dilakukan oleh (Didi Ismoyo 2017) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan atas dasar

tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama Pembangunan pertanian, kedua Pembangunan masyarakat terpadu, ketiga perbaikan pangan, keempat idustralisasi desa, kelima pembangunan masyarakat dan keterampilan masyarakat, keenam peningkatan kesehatan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di desa Cangkol. Pertama faktor pengangguran, kedua faktor ketidaktepatan pendapatan, ketiga faktor sosial lingkungan, keempat faktor rendahnya tingkat pendidikan. masyarakat, kelima, faktor rasio ketergantungan penduduk, keenam pemanfaatan sumber daya pertanian belum optimal, ketujuh faktor kesehatan

- c. Penelitian di lakukan oleh (Supriadi (2017) yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan Di Kota Palopo” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian di lakukan atas dasar tujuan untuk mengetahui Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Khilan dapat dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaan, bantuan sarana & prasarana kepada pelaku Khilan, penyebarluasan informasi usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang. Penguatan Potensi atau Daya berupa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo meskipun belum sepenuhnya maksimal. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Khilan di Kota Palopo meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat kurangnya inovasi dalam pemasaran dan terbatasnya anggaran yang hanya sekian persen, Sedangkan faktor pendukung sumber daya manusia dan sumber daya alam.

- d. Penelitian Di Lakukan Oleh (Agus Efrilian Mua’rif Efektivitas 2021) yang berjudul ”Bantuan Sosial Covid-19 Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Pantai Balai Kabupaten Aceh Tamiang” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian di lakukan atas dasar tujuan untuk

mengetahui bagaimana Penanganan dampak kemunduruan ekonomi segera dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk mengantisipasi dan mengelola dampak transmisi Covid-19 khususnya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2012, bantuan sosial (bansos) merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Perlu nya perbaikan data penerima bantuan sosial sangat diperlukan agar penyaluran program bantuan sosial terkait pandemi virus Corona tepat sasaran dan juga merata. Banyaknya keluhan terkait distribusi bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 membuat Kementerian Sosial terus berupaya mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Data adalah kunci dari penyelesaian masalah pandemi.